

# IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES IN THE SMART KAMPUNG PROGRAM THROUGH THE SIMAS MANDIRI INNOVATION (A Study on Public Services in Genteng Kulon Village, Genteng District, Banyuwangi)

Penerapan Pelayanan Publik Pada Program Smart Kampung Melalui Inovasi Simas Mandiri  
(Studi Pada Pelayanan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Banyuwangi)

Akyuni Islami <sup>1</sup>, Dimas Imaniar <sup>2</sup>, Niko Pahlevi <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

*akyuniiais@gmail.com*

(\*)Corresponding Author  
*akyuniiais@gmail.com*

**How to Cite:** Akyuni Islami. (2026). Implementation Of Public Services In The Smart Kampung Program Through The Simas Mandiri Innovation (A Study on Public Services in Genteng Kulon Village, Genteng District, Banyuwangi). doi: 10.36526/js.v3i2. 5862

Received : 21-07-2025  
Revised : 24-08-2025  
Accepted : 21-10-2025

## Keywords:

Public Service,  
Smart Kampung,  
Simas Mandiri

## Abstract

Genteng Kulon Village leads in public service innovation with its Simas Mandiri program, a technological breakthrough acknowledged and awarded by the Banyuwangi Regent in 2019. Simas Mandiri's initial success was bolstered by adequate resources, encompassing essential hardware (self-service machines, computers, network), integrated software, and crucial supporting infrastructure for efficient operations. However, Simas Mandiri hasn't reached its full potential due to several challenges. In communication, current socialization efforts are ineffective, as residents still prefer manual services, indicating a need for more impactful strategies. Concerning technology resource management, hardware quality has significantly degraded and failed over time, highlighting an urgent need for routine oversight and proactive maintenance. Additionally, an ambiguous and informal bureaucratic structure causes confusion in task distribution and responsibilities, impeding coordination and accountability. Therefore, to ensure Simas Mandiri's optimal performance and sustainability, strategic improvements are vital in communication approaches, technology asset management, and establishing a more structured bureaucracy.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan warga negara, termasuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ini mencakup peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik, dan yang terpenting, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan indikator kunci kinerja pemerintah karena kualitasnya langsung dirasakan oleh masyarakat, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negara (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab 1 Pasal 1 Ayat (1)). Meskipun demikian, persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia masih tinggi.

Data laporan Ombudsman RI Triwulan I tahun 2024 menunjukkan bahwa Kepegawaian dan Administrasi Kependudukan menjadi substansi laporan tertinggi dengan masing-masing 672 dan 134 laporan ([ombudsman.go.id](http://ombudsman.go.id), 2024). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), mencakup penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan untuk pelayanan publik. Pemerintah desa, sebagai garda terdepan pelayanan publik, memiliki

tanggung jawab besar dalam membina masyarakat dan menyediakan pelayanan prima demi kesejahteraan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab 1, Pasal 1, Ayat (2)).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis untuk meminimalisir permasalahan pelayanan publik. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat mengakses layanan kapan pun dan di mana pun, asalkan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Inovasi berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas perangkat desa dalam melayani masyarakat. Kabupaten Banyuwangi telah menjadi contoh implementasi ini melalui program Smart Kampung, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung Bab 1, Pasal 1, Ayat (6). Konsep ini bertujuan mengatasi permasalahan geografis dan jarak di wilayah pedesaan dengan memungkinkan urusan administrasi ditangani secara lokal.

Implementasi Smart Kampung terdapat di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini mengembangkan inovasi Simas Mandiri (Sistem Pelayanan Masyarakat Melayani Sendiri), yang merupakan layanan berbasis self-service untuk 27 jenis administrasi masyarakat tanpa interaksi langsung dengan petugas. Inovasi ini didasari oleh lamanya waktu pelayanan manual, kurangnya staf pelayanan (hanya dua orang), tingginya volume surat (sekitar 40 surat per hari), ketidakakuratan data, dan antrean panjang akibat padatnya penduduk. Simas Mandiri bertujuan mempercepat proses pelayanan, dari 15 menit menjadi satu menit per orang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Genteng Kulon, Drs. Supandi, M.Pd, yang bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Inisiator Pelayanan Publik Mandiri Desa Berbasis Online pada tahun 2019.

Meskipun Simas Mandiri merupakan inovasi berbasis teknologi yang menjanjikan, observasi awal pada 29 Mei 2024 menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat masih cenderung memilih pelayanan manual, mengindikasikan bahwa ketersediaan teknologi informasi harus diimbangi dengan kesiapan dan partisipasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan Smart Kampung melalui inovasi Simas Mandiri dapat meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Genteng Kulon. Dalam kerangka latar belakang yang telah dipaparkan, fokus penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai belum optimalnya implementasi inovasi Simas Mandiri sebagai komponen integral dari penerapan Smart Kampung di Desa Genteng Kulon. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang berimplikasi pada preferensi masyarakat untuk tetap menggunakan pelayanan administrasi secara manual. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara komprehensif bagaimana penerapan Smart Kampung melalui inovasi Simas Mandiri dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan filosofi post-positivisme, menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci untuk memahami fenomena sosial kompleks, khususnya terkait interaksi manusia dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif penerapan Smart Kampung melalui inovasi Simas Mandiri sebagai upaya peningkatan pelayanan administrasi di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi pelayanan publik dengan kerangka Edward III dalam (Kasmad, 2018) meliputi aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, yang diterapkan pada konteks Kantor Desa, pemerintah desa, dan masyarakat di Desa Genteng Kulon. Penelitian ini dijadwalkan berlangsung dari Maret 2024 hingga Juli 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif,

dengan informan kunci seperti Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pengguna Simas Mandiri yang dipilih secara purposive sampling. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, arsip, serta literatur akademik relevan sebagai pelengkap dan pendukung analisis. Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dalam tiga tahapan: reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang logis dan faktual. Untuk menjamin keabsahan data dan validitas temuan, penelitian ini mengimplementasikan empat kriteria utama: Derajat Kepercayaan (Credibility) melalui triangulasi sumber dan member check; Keteralihan (Transferability) dengan deskripsi konteks yang rinci; Kebergantungan (Dependability) melalui pencatatan dan evaluasi proses penelitian yang konsisten; serta Kepastian (Confirmability) yang memastikan objektivitas hasil dengan verifikasi pihak ketiga. Penerapan kriteria ini secara sistematis bertujuan untuk menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Genteng Kulon memang menjadi pelopor dalam inovasi Simas Mandiri, sebuah terobosan dalam pelayanan administrasi berbasis teknologi. Namun, statusnya sebagai inovator pertama tidak lantas membebaskannya dari berbagai tantangan. Meskipun telah berhasil memperkenalkan sistem self-service yang efisien, implementasi program ini di lapangan masih menghadapi beragam kendala. Hambatan-hambatan yang muncul dalam operasional Simas Mandiri tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berakar pada aspek-aspek non-teknis yang kompleks. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, masalah yang bersumber dari internal sistem itu sendiri, serta faktor eksternal yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan partisipasi pengguna, yakni masyarakat desa.

Inovasi Simas Mandiri yang digagas oleh Desa Genteng Kulon memang diakui secara resmi sebagai sebuah terobosan signifikan dan menjadi contoh nyata dalam pengembangan pelayanan publik. Pengakuan ini terefleksi jelas dengan diraihnya penghargaan dari Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 yang secara eksplisit menobatkan Desa Genteng Kulon sebagai inovator pertama di wilayah tersebut dalam mengaplikasikan sistem pelayanan mandiri. Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi formal, melainkan juga validasi atas keberhasilan desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas administrasi kependudukan. Hal ini menempatkan Simas Mandiri sebagai model percontohan yang patut dicermati bagi desa-desa lain, mengukuhkan posisinya sebagai pionir dalam transformasi pelayanan publik di tingkat lokal dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung inovasi yang berorientasi pada masyarakat.

### **Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya, Menurut Rifal, staf pemegang Simas Mandiri, meskipun upaya sosialisasi telah gencar dilaksanakan untuk memperkenalkan inovasi pelayanan ini kepada masyarakat, tingkat adopsi Simas Mandiri masih menghadapi kendala signifikan. Observasi menunjukkan bahwa masyarakat kerap kali lebih memilih jalur pelayanan manual daripada memanfaatkan sistem digital yang sudah tersedia. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi yang substansial, di mana pesan mengenai manfaat dan kemudahan Simas Mandiri belum tersampaikan secara efektif, atau mungkin terdapat hambatan lain yang menyebabkan preferensi masyarakat tetap pada metode konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang ada perlu dievaluasi dan disempurnakan untuk menjembatani kesenjangan persepsi dan perilaku masyarakat terhadap Simas Mandiri.

### **Sumber Daya**

Sumber daya disini di jelaskan sebagai alat dan sistem, Dalam konteks Simas Mandiri di Desa Genteng Kulon, sumber daya dipahami secara konkret sebagai segala perangkat dan infrastruktur sistematis yang esensial untuk menunjang implementasi dan operasionalisasi inovasi pelayanan ini. Ini mencakup spektrum luas, mulai dari perangkat keras (hardware) seperti mesin self-service atau kios informasi interaktif, komputer, printer, hingga perangkat jaringan yang memastikan

konektivitas. Lebih jauh, sumber daya juga meliputi perangkat lunak (software), yakni aplikasi Simas Mandiri itu sendiri, sistem basis data untuk pengelolaan informasi kependudukan, serta platform digital lain yang terintegrasi. Tidak hanya itu, elemen krusial lainnya adalah infrastruktur pendukung, seperti pasokan listrik yang stabil, akses internet yang memadai, dan fasilitas fisik yang dirancang ramah pengguna (misalnya, ruang tunggu yang nyaman dan aksesibel). Secara kolektif, alat dan sistem penunjang inilah yang memungkinkan Simas Mandiri berfungsi secara efisien, memfasilitasi kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, dan pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di desa tersebut.

Pada realitas implementasi di lapangan, observasi menunjukkan adanya degradasi kualitas fungsional yang signifikan pada perangkat keras Simas Mandiri seiring berjalannya waktu. Pada tahun pertama operasional, sistem alat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, menunjukkan kinerja optimal sesuai spesifikasi awal. Namun, berlanjutnya penggunaan dan faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik mulai memicu perubahan fungsi yang progresif. Manifestasi dari degradasi ini terlihat dari respon layar sentuh komputer yang semakin sulit, bahkan seringkali sistem mengalami gangguan mati mendadak (system crash) saat sedang digunakan oleh masyarakat. Puncak dari penurunan kualitas ini mencapai titik di mana perangkat tersebut tidak lagi berfungsi secara optimal, dan pada akhirnya, mengalami kerusakan total, menghambat kelangsungan pelayanan mandiri yang seharusnya diberikan. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan pemeliharaan berkelanjutan dan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga keberlanjutan operasional teknologi dalam pelayanan publik.

### **Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Genteng Kulon, beliau menyatakan kebanggaan dan dukungan penuh terhadap inisiatif program Simas Mandiri sebagai terobosan dalam pelayanan publik desa. Namun, di balik apresiasi tersebut, beliau juga mengakui adanya kendala krusial yang bersifat sistemik, yaitu ketiadaan pengawasan kelayakan yang intens dan berkelanjutan terhadap perangkat keras dan infrastruktur penunjang Simas Mandiri. Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada penurunan fungsi sistem alat tersebut seiring berjalannya waktu. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa mekanisme monitoring dan maintenance yang proaktif, perangkat teknologi rentan mengalami penurunan performa hingga kerusakan total. Pernyataan Kepala Desa ini secara realistis menyoroti bahwa inovasi teknologi, meskipun didukung penuh, memerlukan manajemen aset yang komprehensif dan evaluasi kelayakan operasional secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya dalam jangka panjang, sehingga investasi dan harapan yang disematkan pada Simas Mandiri dapat terpenuhi secara optimal.

### **Birokrasi**

Implementasi Simas Mandiri menghadapi tantangan signifikan karena struktur birokrasinya belum tertata secara formal dan jelas. Kondisi ini secara logis menimbulkan kekacauan fungsional dan hierarki di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengoperasian sistem. Tanpa adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang konkret dan tertulis, ada potensi besar terjadinya hambatan dalam koordinasi antar unit, munculnya ketidakefisienan dalam proses kerja, dan pada akhirnya, berkurangnya akuntabilitas kinerja. Apabila tidak ada panduan birokrasi yang tegas dan transparan, penentuan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, atau penyelesaian masalah pada sistem menjadi tidak jelas. Hal ini berisiko mengurangi efektivitas Simas Mandiri sebagai alat untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, penyusunan kerangka birokrasi yang definitif dan rasional menjadi sangat penting agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Keberadaan sumber daya yang memadai di Desa Genteng Kulon terbukti nyata melalui inisiasi dan implementasi inovasi Simas Mandiri. Ketersediaan sumber daya ini tidak hanya terbatas pada aspek material atau finansial, melainkan juga mencakup kapasitas intelektual dan kepemimpinan visioner yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam solusi digital yang konkret. Ide Simas Mandiri sendiri merupakan manifestasi dari kemampuan desa untuk mengoptimalkan potensi internalnya, baik dari segi

teknologi informasi yang mulai berkembang maupun kesiapan perangkat desa untuk beradaptasi dengan sistem baru.

## PENUTUP

Desa Genteng Kulon telah berhasil memposisikan diri sebagai pelopor inovasi dengan program Simas Mandiri, sebuah terobosan dalam pelayanan administrasi berbasis teknologi yang bahkan diakui melalui penghargaan dari Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019. Keberhasilan awalnya sangat didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, meliputi perangkat keras seperti mesin layanan mandiri, komputer, dan jaringan, serta perangkat lunak yang terintegrasi dan infrastruktur pendukung yang krusial untuk operasional efisien.

Potensi penuh Simas Mandiri saat ini belum tercapai karena beberapa kendala. Pertama, dalam aspek komunikasi, meskipun sudah ada upaya sosialisasi, banyak warga masih memilih cara manual, menunjukkan bahwa pesan tentang manfaat Simas Mandiri belum tersampaikan dengan efektif. Kedua, terkait manajemen sumber daya teknologi, perangkat keras mengalami penurunan kualitas signifikan seiring waktu, hingga rusak total. Hal ini menggarisbawahi perlunya pengawasan rutin dan pemeliharaan yang lebih proaktif untuk menjaga keberlangsungan sistem. Terakhir, struktur birokrasi yang belum jelas dan formal menyebabkan kebingungan dalam pembagian tugas serta tanggung jawab. Ketidakjelasan ini menghambat koordinasi dan akuntabilitas, mengurangi efektivitas Simas Mandiri. Oleh karena itu, agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan perbaikan strategis pada komunikasi, pengelolaan aset teknologi, dan penataan birokrasi yang lebih terstruktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addiansyah, M. N. R. (2024). Smart Village and Public Service Innovation in Endemic Times: Learning from Mojowarno Village. *Matra Pembaruan*. DOI: 10.21787/mp.8.1.2024.75-88
- Administrator. 2021. *Tingkatkan Layanan Informasi Berbasis Digital, Humas Kunjungi Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*, dalam <https://setda.kutaibaratkab.go.id>. 08 Juni 2021.
- Angow, O., Barhanuddin, dan Kolondam (2018). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow*.
- Ardiyanto, R., Imaniar, D., & Permatasari, S. J. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Melalui SIMAS Mandiri (Sistem Masyarakat Melayani Sendiri) dalam Mewujudkan Smart Kampung (Studi di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi). *Nusantara Hasana Journal*. DOI: 10.59003/nhj.v3i9.1092
- Bela P. dan Cahyo S. 2019. *Inovasi Anjungan Layanan Mandiri (Alm) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8 No. 3.
- Chowdhury, M. R., Sourav, M. S. U., & Sulaiman, R. B. (2023). The Role of Digital Agriculture in Transforming Rural Areas into Smart Villages. *Smart Village Studies*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.10012>
- Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2021). Creating Public Value Through Smart Technologies and Strategies. *Government Information Quarterly*.
- Degada, A., Thapliyal, H., & Mohanty, S. P. (2021). Smart Village: An IoT Based Digital Transformation. *IEEE/ArXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.03750>
- Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2022). Conceptualizing Smartness in Government. *Public Management Review*.
- Ilmi, M. R., Suryawati, D., & Indriastuti, S. (2024). Intergovernmental Relations Pattern of Smart Kampung Program in Banyuwangi. *Jurnal Administrare*. DOI: 10.71309/administrare.v11i1.3045
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*.

- Kumar, A., Singh, R., & Sharma, P. (2022). Smart Village Development: Concept, Challenges and Opportunities. *Journal of Rural Development*.
- Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2020). Close Encounters of the Digital Kind: A Research Agenda for Digital Government. *Government Information Quarterly*.
- Lopes, N. V., & Farias, J. S. (2022). Public Service Innovation and Citizen Satisfaction in Digital Government. *Information Development*.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2023). Governing the Smart City: Digital Governance and Public Value Creation. *Urban Governance*.
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. (2021). Agile Governance and Digital Transformation of Government. *Government Information Quarterly*.
- Musdalifah, L., Sunariyanto, & Suyeno. (2025). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Digital (Studi Pada Desa Banjararum, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*
- Nam, T. (2020). Smart City and Smart Government: Concepts and Challenges. *International Review of Public Administration*.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2024. *Laporan Triwulan I*. Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia, dalam [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/743/LTR\\_file\\_20220829\\_101320.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/743/LTR_file_20220829_101320.pdf).
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2021). A New Theory for Public Service Management? Toward a Public Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*.
- Saleh, C., Ibad, S., Mindarty, L. I., & Hariyono, B. S. (2023). Public Service Innovation Process of Smart Kampung Program at Banyuwangi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(1), 229–248. DOI: 10.25139/jsk.v7i1.5854.
- Santoso, B., Widodo, S. P., Bramuda, M. Y., & Wardiyanto, B. (2025). Collaborative Governance Analysis in the Implementation of the Smart Village Program in Banyuwangi Regency. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*. DOI: 10.29103/jsds.v12i1.25792.
- Setyawan, Dody, and Nanang Bagus Srihardjono. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang*.
- Tan, S. Y., & Taeihagh, A. (2020). Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review. *Sustainability / Smart Governance Studies*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Visvizi, A., Lytras, M. D., & Mudri, G. (2020). Smart Villages in the EU and Beyond. *Springer*.
- Voorberg, W., Bekkers, V., & Tummers, L. (2021). Innovation in the Public Sector and Co-Creation with Citizens. *Public Management Review*.
- Yunas, N. S., Hakim, A. I., & Pohan, I. A. (2023). Triple Disruption and Acceleration of Digitalization in Villages: Study of Innovation Policy of Smart Kampung in Banyuwangi. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. DOI: 10.21787/mp.7.2.2023.87-97.